

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, pengembangan kualitas kehidupan masyarakat yang merupakan bagian utama dari suatu bangsa dan negara membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah yang terintegrasi secara baik dari pusat hingga ke daerah. Di dalam penerapan otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Pengelolaan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan suatu organisasi atau badan. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kejelasan sasaran anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas laporan keuangan terhadap masyarakat. RAPBD

diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi sasaran atau target yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah pada suatu anggaran meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses

penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat.

Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan ini menjadi perhatian utama. Besaran angka tersebut secara tidak langsung mengungkapkan kapasitas pegawai dalam penyusunan anggaran.

Mardiana (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis varians anggaran belanja pada tahun 2013 dan 2014 dinas perkebunan kabupaten musu banyuasin dapat dikatakan cukup efektif. Hanya saja untuk tahun 2015 persentase pencapaian hanya mencapai 81,51% yang secara otomatis dapat dikatakan kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas belanja pada tahun 2013 dan 2014

dinilai cukup efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja yaitu sebesar 91,17% dan 94,71%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2015 dinilai kurang efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja karena hanya mencapai 81,51%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran belanja lebih kecil dari target anggaran.

Tantri dan Irmawati (2018) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.

Muryanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif.

Rahayu (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan kuantabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan

kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Pemerintah Kabupaten Alor merupakan lembaga teknis yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan dalam aspek terbentuknya. Dalam hal ini berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya. Dalam semua aspek yang ada pada proses pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran juga belanja daerah agar terlaksana keefisienan dan keefektifan penggunaan anggaran yang ada yang telah dianggarkan. Dalam penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja selama masa anggaran satu tahun tersebut. Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Alor”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Alor.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan dalam penelitian yaitu analisis kinerja anggaran belanja pada pemerintah kabupaten alor yaitu “Bagaimana kinerja anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2017-2021?”

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada pemerintah Kabupaten Alor tahun 2017-2021.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Akademis.

Secara akademik, penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasana keilmuan Akuntansi terutama Akuntansi Sektor Publik, serta peneliti lanjutan dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti.

Penelitian ini bermanfaat guna menambah wawasan penulis tentang kinerja anggaran belanja yang ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Alor

2. Bagi pembaca

Dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik atau judul yang sama, serta memberikan refesiensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis kinerja anggaran belanja.